



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 2 September 2022

Kepada Yth,
Sdr/i. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 910/ 581 /BPKPAD-PS/IX/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN PERUBAHAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

I. Prioritas Pembangunan Daerah

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang memuat program prioritas dan plafon anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai implementasi dari KUA dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai batas maksimal anggaran.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD Tahun Anggaran 2022. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 memperhatikan hal-hal berikut :

1. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2022.
2. Penyesuaian atas pendapatan transfer pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25 /Pmk.07 /2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.
3. Penyesuaian atas pendapatan transfer pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/Pmk.07 /2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
4. Penyesuaian atas dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-604-2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
5. Penyesuaian hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

Secara umum perubahan kebijakan belanja Tahun Anggaran 2022 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD Tahun Anggaran 2022. Selain itu, penganggaran belanja daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada semester I (pertama). Beberapa penambahan belanja daerah disesuaikan dengan kebutuhan yang belum terpenuhi hingga pertengahan tahun anggaran ini.

II. Alokasi Prioritas Plafon Anggaran Sementara SKPD

NO	OPD	APBD Awal TA. 2022	PPAS PERUBAHAN TA. 2022
1	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	597,836,426,290	618,519,721,035
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	113,135,245,146	161,190,655,660
3	1.02.0.00.0.00.01.0024 RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	102,188,875,909	116,257,376,703
4	1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	159,633,135,681	181,983,040,643
5	1.04.2.10.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27,871,547,270	27,240,268,844
6	1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8,993,669,580	9,534,285,099
7	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11,925,744,896	12,310,371,106
8	1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,253,368,679	5,254,003,622
9	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,650,518,438	6,059,428,743
10	2.14.2.13.0.00.03.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13,540,879,006	13,780,796,315
11	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	13,744,616,393	14,360,399,951
12	2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,979,715,080	8,447,901,556
13	2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	4,521,784,559	4,969,170,922
14	2.18.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,791,856,741	4,287,997,132
15	2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	16,243,615,716	19,409,815,875
16	2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4,510,040,637	4,830,012,487
17	3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	21,035,336,427	20,595,960,918
18	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	45,154,327,662	51,729,310,314
19	3.30.3.32.3.31.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	23,401,063,466	24,777,915,811
20	4.01.6.01.8.01.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	27,645,772,165	27,577,193,892
21	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	50,074,235,411	49,844,623,549
22	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5,873,875,969	6,576,508,760
23	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	292,300,308,467	319,497,660,180
24	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7,491,777,044	7,463,351,006
25	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	7,487,170,195	5,991,734,006
26	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SILAUT	1,722,892,132	1,761,703,509
27	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	2,318,444,785	2,313,053,934
28	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LUNANG	1,640,597,325	1,655,460,438
29	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	2,611,864,354	2,505,306,235
30	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BAYANG	2,807,991,288	2,741,637,731
31	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	1,885,012,117	1,955,246,535
32	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN IV JURAI	2,409,970,039	2,339,568,369
33	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN BATANG KAPAS	2,078,672,864	2,109,469,983
34	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SUTERA	2,034,252,640	2,203,395,519
35	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN RANAH PESIR	2,482,059,709	2,222,757,399
36	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN LENGAYANG	2,045,352,846	1,952,787,056
37	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	1,852,258,079	1,883,810,089
38	7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN PANCUNG SOAL	1,585,648,352	1,797,814,105
39	7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN AIRPURA	1,393,859,115	1,538,683,258
40	7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	1,520,305,100	1,627,471,446
41	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,325,145,031	6,157,958,430
TOTAL		1,659,324,726,602	1,759,255,628,165

III. Jadwal Penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD

No.	Uraian	Hari/tanggal
1.	Penyerahan dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 (dua) rangkap ke BPKPAD (Bidang Anggaran)	Senin 5 September 2022
2.	Pembahasan RKA-SKPD antara TAPD dan OPD	Rabu-Kamis (7-9 September 2022).
3.	Penyampaian Nota RAPBD Perubahan TA. 2022 ke DPRD	Senin (12 September 2022)
4.	Pembukaan jadwal RAPBD Perubahan pada aplikasi SIPD	Selasa (13 September 2022)
5.	Pembahasan RKA-SKPD bersama Banggar DPRD	Selasa-Kamis (13-15 September 2022).
6.	Perbaikan RKA-SKPD sesuai dengan hasil pembahasan serta tutup jadwal RAPBD Perubahan pada Aplikasi SIPD	Jumat-Minggu (16-18 September 2022)

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI PESISIR SELATAN**

Drs. RUSMA YUL ANWAR. M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip